

PENGEMBANGAN PROGRAM: BI

Bimas Nasional

Latar Belakang

Program intensifikasi produksi padi dengan nama Bimas secara nasional, dilaksanakan pada musim hujan 1965/1966. Hasil yang dicapai Bimas 1965/1966 dilaporkan seperti yang tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil yang Dicapai oleh BIMAS SSBM Musim Penghujan 1965/1966"

Propinsi	Realisasi Demas		Produksi Dalam Bimas Rata-rata (Ku/Ha)	Produksi Di Luar Bimas Rata-rata (Ku/Ha)	Kenaikan Produksi Karena Bimas	
	Unit	Ha			(Ku/Ha)	(%)
Jawa Barat	713	35.500	48,42	33,21	15,21	44
Jakarta Raya	10	500	41,40	35,30	5,10	14
Jawa Tengah	1.000	71.892	65,00	30,00	35,00	110
Yogyakarta	103	5.943	61,50	40,00	21,50	54
Jawa Timur	507	25.388	57,37	35,14	22,23	63
Jambi	28	1.400	44,40	33,50	10,90	33
Sumatera Selatan	40	2.064	59,35	35,10	24,17	69
Lampung	10	500	83,44	34,45	48,99	150
Kalimantan Timur	10	500	49,00	22,00	27,00	123
Sulawesi Selatan	249	12.450	60,04	34,40	25,64	74
NTB	31	1.588	63,25	29,50	33,75	110
NTT	2	100	24,10	15,60	8,50	54

• Data tidak lengkap, karena belum semua daerah melaporkannya.

Sumber : Kretosastro, 1967.

Semula rencana Bimas MH 1965/1966 meliputi 150.000 ha. Tetapi karena antusiasme daerah maka rencana tersebut terlampaui menjadi 220.000 ha (Kretosastro, 1967). Meskipun demikian, produktivitas Bimas 1965/1966 tidaklah sebaik Demas MH 1964/1965, sebab-sebabnya antara lain (Kretosastro, 1967):

1. Kurang lancarnya penyaluran logistik pupuk, obat-obatan, alat-alat seperti **sprayer**, dan sebagainya.
2. Kurang adanya fasilitas pengangkutan.
3. Kurang lancarnya kredit untuk petani.
4. Kurang intensifnya pelaksanaannya, karena setiap unit dibimbing Koperta, sedang mahasiswa pembimbing memegang sektor yang terdiri dari 3-5 unit.
5. Karena adanya G30S/PKI, yang membuat suasana di daerah berbahaya dan menyulitkan pelaksanaan penyuluhan.
6. Perencanaan yang tergesa-gesa dan tidak sempurna bagi daerah-daerah tertentu, misalnya Kalimantan Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur.

Untuk MH 1966/1967, perencanaan program Bimas didasarkan pada konperensi kerja Bimas SSBM di Tretes Jawa Timur pada tanggal 19-21 April 1966. Dalam konperensi tersebut, Bimas 1965/1966 dinilai berhasil dalam meningkatkan produksi, walaupun banyak hambatan karena situasi politik akibat G30S/PKI maupun kesulitan biaya untuk menjamin pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut, diputuskan areal Bimas 1966/1967 meliputi 1.350.000 ha yang terdiri dari 1 juta ha areal Bimas dan sisanya merupakan proyek intensifikasi yang disebut Projek Dewi Sri Djaja di daerah sekitar Jakarta yaitu Karawang, Subang, Indramayu dan lain-lain. Untuk mendukung pelaksanaan program yang semakin meluas, terjadi peningkatan areal sekitar 150.000 ha dibanding dengan luas areal target pada masa tanam sebelumnya, dikerahkan tenaga mahasiswa dari perguruan tinggi selain Fakultas Pertanian IPB. Mahasiswa-mahasiswa yang dilibatkan adalah mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian di luar IPB, IKIP, Akademi Teknik, Akademi Pertanian Ciawi, Fakultas Ekonomi dan Sosial Politik yang semuanya berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa.

Pengorganisasian Bimas

Perubahan nyata pada Bimas 1966/1967 adalah dalam hal pendanaan program. Sebagai hasil konperensi di Tretes pendanaan diintegrasikan dengan pengoperasian KOLOGNAS (Komando Logistik Nasional) yang mempunyai tanggung jawab utama dalam penyediaan dan pendistribusian beras untuk pegawai negeri dan militer. Sebagian dana pemerintah (30%) untuk Kolognas yang sedianya untuk pembelian beras, digunakan untuk membiayai program Bimas 1966/1967.

Pada musim tanam 1967/1968, pengorganisasian program Bimas mengalami kesimpangsiuran atau ketidakjelasan karena begitu banyaknya jenis Bimas. Salah satu diantaranya, terdapat jenis Bimas yang dibiayai oleh propinsi dan Bimas Nasional. Disamping itu terdapat juga administrasi yang terpisah dari proyek-proyek seperti Dewi Sri Jaya dan Medan Jaya. Selain itu terdapat Bimas Gogo Rancah yang meliputi areal padi gogo pada daerah yang cukup curah hujan. Sedangkan Bimas Berdikari, pendanaannya dipikul oleh propinsi atau oleh petani itu sendiri. Di Sulawesi Selatan dikenal Bimas CIBA dimana pemerintah memperoleh kredit dalam bentuk input dari CIBA, suatu perusahaan pestisida dari Swiss. Tipe lain Bimas adalah Bimas Baru yang khusus untuk memperkenalkan varietas baru PB 5 dan PB 8. Sedangkan khusus di Sumatera dikenal KOPAN yang mengembangkan varietas padi yang hasilnya tinggi. Di beberapa tempat, program Bimas lokal dibiayai oleh pabrik gula, penggilingan padi, perusahaan seperti PT Mantrust di Jawa Barat serta perkebunan swasta dan pemerintah.

Target dan Realisasi

Areal Bimas dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi produksi per ha cenderung menurun. Walaupun demikian jumlah produksi padi Bimas masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi non Bimas (Tabel 6).

Tabel 6. Kenaikan Hasil Bimas Nasional dari MH 1963/1964 sampai dengan MK 1967

MH/MK	Luas (ha)		Hasil Padi ku/ha		Kenaikan Hasil	
	Rencana	Realisasi	Bimas	Non Bimas	ku/ha	%
1963/1964	100	105	66.90	43.00	23.40	54.4
1964/1965	10 000	9 985	72.95	33.92	39.03	115.0
1965/1966	150 000	172 488	52.85	27.11	25.74	94.9
1966	200 000	160 129	45.30	25.00	20.30	81.2
1966/1967	495 000	462 520	48.93	31.79	17.14	53.9
1967	15 000	10 000	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengendali Bimas, 1991.

Penyaluran Sarana Produksi

Dari sudut kepentingan petani, prosedur pengambilan kredit dari BNI Unit II (BRI) dinilai berbelit-belit dan menyita waktu dan tenaga. Hal ini disebabkan antara lain karena jarak yang terlalu jauh antara desa sasaran dengan bank, yang bertanggung jawab dalam penyaluran kredit ke desa melalui Koperta atau ketua kelompok/kontak tani. Bunga pinjaman, semula ditetapkan 3% per bulan tetapi karena dinilai terlalu berat, diturunkan menjadi 1% per bulan. Jangka waktu peminjaman ditetapkan 7 bulan dinilai sangat merugikan petani karena pada masa pembayaran harga padi dan beras paling rendah.

Penyaluran sarana produksi berupa bibit, pupuk, obat-obatan, alat penyemprot dan alat pengairan mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut berkaitan dengan belum adanya sistem pengadaan sarana produksi yang memadai, yang rencananya dilakukan oleh Koperta. Masalah kelembagaan ini timbul karena belum terbinanya jiwa berkoperasi yang sehat di antara pengurus dan anggota Koperta. Hal ini tidak terlepas dari belum adanya pembinaan secara intensif dan dasar pedoman yang jelas pada koperasi-koperasi di Indonesia, termasuk Koperta. Disamping itu

beberapa pejabat daerah lebih memandang Koperta sebagai badan sosial dan belum mengakui Koperta sebagai mata rantai ekonomi di dalam penyaluran sarana produksi. Sebagai akibatnya pengembangan modal dalam koperasi tidak ada. Disamping itu karena pengurus tidak memperoleh imbalan yang layak, pengurus tidak menunaikan tugas secara baik dan pada akhirnya timbul penyelewengan.

Penyaluran bibit unggul sering mengalami hambatan, antara lain adalah kuantitas dan kualitasnya tidak sesuai dengan ketentuan, dan keterlambatan penyaluran sehingga petani terpaksa menanam jenis bibit lain. Kualitas pupuk dari PN Pertani dinilai kurang baik karena sudah terlalu lama disimpan dan jumlahnya diduga kurang dari ketentuan. Selain itu jarak antara gudang dengan petani relatif jauh sehingga menimbulkan keterlambatan.

Pegembalian Kredit

Masalah penunggakan kredit masih merupakan masalah utama pada masa Bimas Nasional (Tabel 7). Berbagai masalah terutama berkaitan dengan ketidاكلancaran penyaluran kredit disebabkan karena faktor kelembagaan yang kurang mendukung.

Tabel 7. Keadaan Sisa Kredit Bimas Nasional sampai dengan April 1969

Musim	Jumlah Kredit (Rp)	Sisa Kredit (Rp)	Persen Sisa dari Jumlah
1967/1968	783.815.000	215.611.000	24.4
1968	1.032.603.000	684.409.000	66.2
1968/1969	1.027.803.000	1.824.341.000	94.6
1969	53.787.000	18.512.000	34.4
Jumlah	3.898.008.000	2.742.873.000	70.6

Sumber : Badan Pengendali Bimas, 1991.

Dari sudut penyaluran kredit, berbagai kekurangan dalam pengembaliannya kredit secara tidak langsung

disebabkan oleh ketidaklancaran penyaluran sarana produksi seperti yang telah dikemukakan. Berbagai masalah tersebut, pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi tidak sebagaimana yang diharapkan, sehingga pengembalian kredit terlambat.

Ditinjau dari sudut kelembagaan, belum ada sanksi terhadap peminjarn. Disamping itu pihak petugas penagih kredit dari Koperta belum aktif melakukan penarikan angsuran. Hal lain yang diduga berhubungan dengan ketidaklancaran dalam pengembalian kredit adalah karena pengambilan kredit dilakukan secara berkelompok, sehingga rasa tanggung jawab pengambil kredit secara perseorangan cenderung tidak ada.

Penyuluhan

Pada masa program Bimas (1965-1967) kegiatan penyuluhan mengalami banyak penurunan dibandingkan dengan masa-masa Demas. Metoda penyuluhan berupa kursus-kursus, demonstrasi atau percontohan jarang sekali dilakukan. Penyebaran inovasi teknologi dilakukan dalam forum-forum rapat desa dengan penggerak para pamong desa. Dengan demikian penyebaran inovasi kepada petani tidak didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan tetapi cenderung bersifat instruktif.

Timbulnya masalah ini tidak terlepas dari kekurangan tenaga penyuluh, karena jumlah petugas Dinas Pertanian sangat terbatas dan sangat sibuk dengan kegiatan non penyuluhan. Masalah ini menjadi semakin terasa karena pada saat perguruan tinggi non pertanian menarik kembali mahasiswanya dari lapangan pada tahun 1967.

Dengan demikian apabila dibandingkan dengan masa Demas, walaupun program Bimas semakin luas jangkauannya, tetapi beberapa prinsip penyuluhan semakin ditinggalkan karena cenderung mengejar target produksi.

Bimas Gotong Royong

Latar Belakang

Sebagai akibat keterbatasan devisa negara untuk melancarkan program Bimas serta adanya berbagai kelemahan yang dijumpai pada program Bimas Nasional, pemerintah memperkenalkan atau rnengintroduksikan sistem Bimas Gotong Royong (Bimas GR) pada tahun 1968/1969. Seperti yang tersirat pada namanya, penyelenggaraan program Bimas merupakan kerjasama antara pemerintah dan perusahaan swasta asing, terutama dalam penyediaan dana.

Kerjasama dengan perusahaan asing ini berawal dari pengalaman pemerintah bekerjasama dengan CIBA dalam menyelenggarakan Bimas di Sulawesi Selatan pada tahun 1967/1968. Kerjasama ini dilanjutkan pada MH 1968/1969 yang menandai permulaan Bimas GR di tiga propinsi di Jawa. Pada musim tanam berikutnya kerjasama ini dijalin dengan perusahaan asing lainnya yaitu HOECHST, COOPA, AHT dan MITSUBISHI (Tabel 8).

Perusahaan-perusahaan ini hanya menyediakan dana berupa paket sarana produksi yang terdiri dari bibit, pupuk, insektisida dan uang sebagai biaya hidup serta upah pemberantasan hama, lampu perangkap hama (light traps) dan alat-alat penunjang untuk penyuluhan. Kredit ini sifatnya tanpa bunga.

Khusus pada Bimas GR CIBA, diterapkan pemberantasan hama dengan cara penyemprotan dengan pesawat udara yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas hama secara intensif terutama untuk daerah-daerah yang sering mendapat serangan hama sundep yang parah (misalnya di pantai utara Jawa).

Tabel 8. Target Bimas GR (1968169 - 1969170) Menurut Musim Tanam dan Perusahaan.

No	Perusahaan/ Musim Tanam	Tanggal Perjanjian	Propinsi	Target (x 1000 ha)
I.	CIBA			
1.	MH 1968169	24 Mei 1968	Jatim Jateng Jabar	100 100 100
2.	MK 1969/70	28 Nopember 1968	Jateng Jabar	30 120
3.	MK 1969/70	28 Nopember 1968	Jatim Jateng Jabar	100 100 100
4.	MH 1969/70	5 Mei 1969	Jatim Jateng Jabar	100 100 200
5.	MK 1969/70	13 September 1970	Jatim Jateng Jabar	100 100 200
	Total			1550
II.	HOECHST			
1.	MK 1969170	20 Desember 1968	Jabar	100
2.	MK 1969/70	20 Desember 1968	Jatim	100
3.	MH 1969/70	25 Juni 1969	Jatim	200
4.	MH 1969/70	7 Juli 1960	Jatim	50
5.	MH 1969170	1 Nopember 1969	Jatim	300
	Total			750
III.	COOPA			
1.	MK 1969/70	31 Desember 1968	Jabar	150
2.	MK 1969/70	19 Februari 1969	Jateng	100
3.	MH 1969/70	25 Juli 1969	Jabar	50
4.	MH 1969170	25 Oktober 1969	Jabar	47,5
5.	MH 1969170	25 Oktober 1969	Jateng	100
	Total			447,5
IV.	AHT			
1.	MK 1969	24 Nopember 1969	Sumbar	50
2.	MH 1969/70	3 Nopember 1969	Sumbar	40
	Total			90
V.	MTSUBISHI			
1.	MH 1969/70	20 Juni 1969	Jabar	200
2.	MH 1969/70	25 Juli 1969	Lampung	25
3.	MH 1969/70	28 Oktober 1969	Jabar	200
4.	MH 1969/70	28 Oktober 1969	Lampung	25
	Total			450

Sumber : Badan Pengendali Bimas, 1970.

Dengan sarana produksi tersebut di atas diharapkan produksi meningkat dari 2,8 ton/ha menjadi 4,2 ton/ha dalam bentuk padi atau 1,4 ton/ha menjadi 2,1 ton/ha dalam bentuk beras. Secara teknis, target kenaikan produksi tersebut dapat dicapai. Disamping itu pemerintah tidak dirugikan karena petani mampu mengembalikan kredit tidak kurang dari 3,1 ku beras per ha. Harga beras di pasar internasional pada saat itu adalah US \$ 13 per ku (Wardojo dan Djatijanto, 1970). Ditinjau dari kepentingan kedua pihak yaitu pemerintah dan perusahaan swasta asing, kerjasama di antara mereka menguntungkan dan dari segi kelayakan perusahaan yang terlibat tidak diragukan. CIBA mempunyai keuntungan sampingan dengan terlibatnya dalam program Bimas ini karena CIBA juga memproduksi barang-barang lain (obat-obatan) di Indonesia, sehingga jika usahanya dalam Bimas GR kurang menguntungkan dalam jangka pendek tetapi dalam jangka panjang menguntungkan dalam kaitannya dengan kepentingan perusahaannya (Rieffel, 1969).

Target dan Realisasi

Target Bimas GR (1968169-1969170) tercantum pada Tabel 8. Menurut taksiran BULOGNAS, pengembalian kredit untuk proyek Bimas GR CIBA I (MH 1968169) hanya mencapai 40,3% (47.975,4 ton beras) dari rencana yang diperhitungkan (Hadisapoetro, 1970).

Dalam paket yang diterima petani diperhitungkan biaya untuk bimbingan (sebagai "*management fee*" Rp. 200,-/Ha) dan 2/3 biaya pemberantasan hama dengan pesawat udara. Besarnya nilai kredit yang diterima oleh petani tercantum pada Tabel 9.

Berdasarkan perhitungan di atas dan data pada Tabel 9 rata-rata subsidi yang diterima petani per hektar besarnya Rp. 7.308,-, dengan asumsi harga padi diperhitungkan seperti harga di tingkat petani saat penelitian (Kasryno, 1970). Kalau harga padi yang dibayarkan oleh petani dinilai

setaraf dengan beras impor, maka besarnya subsidi yang dibayar oleh pemerintah sekitar Rp. 4.400,-/ha. Nilai kredit yang diterima petani ini kira-kira 61% adalah nilai obat-obatan dan biaya penyemprotan dengan pesawat udara oleh CIBA. Biaya penyemprotan dengan pesawat udara oleh CIBA adalah US \$ 6/ha untuk MH 1968/1969. Biaya penyemprotan dengan pesawat udara mencapai 20% nilai kredit yang diterima petani.

Tabel 9. Nilai Perhitungan Kredit yang Diterima Petani Di Enam Desa Bimas CIBA-I Untuk Setiap Hektar.

No.	Desa	Nilai Kredit (Rp)	Nilai Kredit Riil (Rp)	Pengembalian (Rp)	Subsidi (Rp)
1.	Cidahu	12 031	6 764	5 114	6 917
2.	Mariuk	11 976	6 700	3 680	8 296
3.	Rowosari	12 137	6 878	3 920	8 247
4.	Banyutowo	12 037	6 770	6 259	5 778
5.	Gemarang	14 278	9 011	5 472	8 806
6.	Sidomulyo	14 509	9 635	9 801	5 104
	Rata-rata	12 894	7 628	5 586	7 308

Sumber : Azis. 1970

Penyaluran Sarana Produksi dan Biaya Hidup

Secara umum paket kredit Bimas Gotong Royong tidak terlalu berbeda dengan paket sebelumnya yaitu terdiri dari pupuk (Urea dan KCL), insektisida, alat-alat pemberantas hama, serta bibit unggul (PB 5 dan PB 8), biaya hidup dan upah penyemprotan (Badan Pengendali Bimas, 1970). Yang khas, dalam Bimas Gotong Royong terdapat bantuan penyemprotan insektisida dengan menggunakan pesawat udara yang dipandang sebagai inovasi baru bagi para petani. Cara ini hanya dilakukan pada Bimas Gotong Royong CIBA. Bimas Gotong Royong HOECHST, COOPA, AHT dan MITSUBISHI tidak melaksanakan penyemprotan udara. Cara ini pada waktu itu dipandang menguntungkan bagi daerah yang sering mendapat serangan hama yang berat. Namun demikian, banyak ditemui kasus keterlambatan dalam

penyemprotan insektisida di beberapa tempat. Juga dalam frekuensi penyemprotan, pada waktu itu kurang memenuhi syarat dan tidak merata. Sebagai contoh, di beberapa daerah Subang frekuensi penyemprotan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tiga kali dalam semusim. Penyemprotan tiga kali hanya dilakukan pada 26,85% dari luas areal, sedangkan 55,13% dari luas areal disemprot dua kali dan 23,97% sisanya hanya disemprot satu kali (Hadisapoetro, 1970). Sebaliknya ada areal non Bimas Gotong Royong yang disemprot.

Penyemprotan dengan pesawat udara ini menimbulkan berbagai kontroversi diantara para ahli atau pengamat. Sebagian ahli berpendapat bahwa cara penyemprotan dengan pesawat udara, sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang sering mendapat serangan hama. Di lain pihak, ditinjau dari segi efisiensi, penyemprotan dari udara ini dianggap terlalu mahal mengingat biayanya mencapai 20% dari total kredit sedangkan dengan penyemprot biasa yang bisa dilakukan oleh petani sendiri tidak membutuhkan biaya atau dengan biaya yang relatif murah. Pada waktu itu belum terpikirkan bahaya aplikasi insektisida terhadap lingkungan.

Selain itu cara ini dinilai tidak efektif karena dalam penyemprotan hama melalui udara dilakukan dengan tidak cukup mempertimbangkan persyaratan-persyaratan umur padi di areal, dan seringkali dinilai tidak efektif karena penyemprotannya dilakukan terlambat.

Efektivitas penyemprotan dengan Demicron 100 melalui udara (ultra low volume) masih disangsikan, karena terjadi ledakan hama sundep di Subang yaitu seluas 6179 ha (12% areal Bimas CIBA I di Subang) (Kasryno, 1970). Petani juga menghendaki agar mereka sendiri yang melakukan penyemprotannya.

Walaupun secara prosedur pengambilan paket kredit relatif mudah, tetapi dalam beberapa hal dijumpai masalah-

masalah berkenaan ketepatan waktu, kesesuaian jumlah dan kualitas paket kredit dengan kebutuhan petani.

Dalam hal penyaluran pupuk, obat-obatan dan bibit masih ditemui kesulitan seperti halnya dalam Bimas Nasional. Masalah tersebut berkisar pada masalah kualitas, keterlambatan dalam penyalurannya. Di beberapa daerah penyaluran pupuk mengalami keterlambatan dan bahkan sebagian kualitasnya menurun karena tidak tersedia tempat penyimpanan yang memadai atau karena bungkusnya rusak (Bimas GR COOPA).

Sedangkan dalam hal penyaluran paket kredit terdapat perbaikan dalam hal prosedur pemberian kredit, yaitu dengan cara memberikan kredit langsung tingkat desa. Sarana produksi tersebut diangkut langsung dari pelabuhan ke desa-desa oleh perusahaan swasta asing yang terlibat. Selanjutnya, paket kredit diberikan kepada petani melalui kepala desa yang menjadi pembina tingkat desa (Dewan Pelaksana Bimas Desa), sedangkan kredit uang disalurkan oleh BULOGDA langsung kepada Kepala Desa (Hadisapoetro, 1970). Dengan demikian, BRI, PN Pertani dan Koperta tidak diikutsertakan dalam Bimas Gotong Royong. Dengan perubahan kebijaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah atau mempercepat penyaluran kredit. Kemudahan lain untuk memperoleh paket kredit adalah jaminan lunak (*zakelijke borg*) tidak disediakan dan pengembaliannya tidak diminta serta tanpa bunga. Seperti halnya dalam penyaluran paket sarana produksi, penyaluran kredit uang (*cost of living*) agak terlambat baik oleh CIBA maupun COOPA.

Besarnya paket kredit Bimas Gotong Royong yang ditentukan dari pusat kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran program. Di daerah yang petaninya telah menyadari manfaat penggunaan input baru seperti di desa Cidahu, Subang dan Cianjur, dosis paket pemupukan yang diberikan tidak sesuai dengan dosis pupuk untuk daerah

tersebut, yang biasa digunakan petani. Disamping itu, jumlah sarana produksi yang diterima petani kurang dari ketentuan. Sebaliknya di beberapa tempat dijumpai pemberian pupuk yang berlebihan, sehingga kelebihannya dijual kepada petani lainnya. Hal serupa juga dilakukan oleh petani karena jenis sarana produksi yang ada dianggap tidak cocok dengan selera dan kebiasaan petani.

Pada umumnya waktu penerimaan sarana produksi pupuk, bibit dan obat-obatan terlambat. Misalnya untuk Subang pada MH 1968/69 petani mulai menanam bulan Oktober 1968 sedangkan pupuk baru datang bulan Desember 1968 (Kasryno, 1970). Sebagai akibatnya, seluas 23421 ha (47%) areal Bimas tidak menggunakan pupuk secara memadai. Di daerah lain, Cianjur, keterlambatan penyaluran sarana produksi Bimas Gotong Royong COOPA MK 1969 dan peredaran pupuk di luar program dengan harga Rp. 25,- sampai dengan Rp. 26,- per kg urea dan TSP yang relatif murah menyebabkan beberapa petani menolak ikut Bimas Gotong Royong MK 1969, sehingga sampai dengan Juni 1969 realisasi luas Bimas COOPA MK 1969 di daerah tersebut baru mencapai 46%.

Hasil penelitian Bimas GR CIBA MH 1968/69 menunjukkan bahwa tidak seluruh petani memperoleh bibit unggul tepat waktu sesuai dengan ketentuan (Kasryno, 1970). Dari enam desa contoh Bimas GR CIBA MH 1968/69 hanya petani di desa Gemarang (Kabupaten Ngawi) dan desa Sidomulyo (Kabupaten Sidoarjo) yang seluruhnya menerima bibit unggul, sedangkan di Desa Mariuk (Subang) hanya sekitar 10% menerima bibit unggul PB-5. Di Kabupaten Subang 25% petani menanam bibit unggul Nasional dan PB-5 dan sisanya menanam jenis lokal. Sekitar 50% penyaluran bibit ini terlambat diterima petani, 47% penyaluran sarana produksi pupuk terlambat untuk Kabupaten Subang dan 50% terlambat untuk Kabupaten Sidoarjo.

Obat-obatan pemberantas hama tikus yang disediakan sangat minim (20 gram/ha) dan bahkan banyak petani yang tidak menerimanya. Sebagai akibatnya, untuk daerah Subang misalnya seluas 23% areal terkena serangan hama tikus.

Pengembalian Kredit

Pengembalian kredit ditentukan seperenam dari hasil kotor panen (sebelum dikurangi bawon) menurut INPRES No. 31 tanggal 17 Oktober 1968. Dengan ketentuan seperti ini diharapkan imbang antara harga sarana produksi/pupuk dengan harga beras tidak lagi dipersoalkan tetapi cukup memberikan insentif kepada para petani. Di lain pihak resiko keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bimas dapat dipikul bersama antara pemerintah dan petani dengan cara bagi hasil (bukan berdasarkan nilai mutlak terhadap besarnya kredit).

Dalam pengembalian kredit sistem ini terdapat beberapa masalah. Masalah pertama, terdapat variasi dalam pelaksanaan prosedur pengembalian kredit di tingkat daerah. Variasi tersebut timbul karena perbedaan persepsi mengenai perhitungan total hasil yang dimaksudkan. Di beberapa daerah pengembalian kredit sebesar seperenam dari hasil ubinan, di tempat lain seperenam dari hasil kotor. Pada dasarnya pengembalian kredit dengan cara ini menyulitkan karena dibutuhkan tenaga petugas yang cukup banyak untuk mengumpulkan pengembalian kredit terutama pada saat panen yang bersamaan waktunya. Masalah kedua, beberapa daerah menentukan kebijaksanaan tersendiri dengan menetapkan jumlah minimum padi yang harus disetorkan kepada pemerintah sebagai pengembalian kredit yang juga bervariasi antar daerah. Dengan cara ini petani yang belum melunasi pengembalian sebesar jumlah minimum dianggap masih mempunyai pinjaman. Bagi petani di daerah yang menerapkan sistem ini, pengembalian kredit Bimas dipandang sangat berat terutama pada saat panen relatif rendah. Di

Sidoarjo, batas minimum pengembalian kredit 10 ku/ha untuk PB, 7,5 ku/ha untuk jenis lainnya, dan di Pemalang 9,5 ku/ha untuk semua jenis (Kasryno, 1970). Variasi pengembalian kredit tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Realisasi Pengembalian Kredit Per Ha oleh Petani Enam Desa Bimas G.R. CIBA di Jawa M.H. 1968/69

No.	Desa	Produksi Rata-rata ku/ha	Pengembalian Kredit ku/ha
1.	Cidahu	27	3,6
2.	Mariuk	20	3,1
3.	Rowosari	28	3,3
4.	Banyutowo	29	5,5
5.	Gemarang	44	5,9
6.	Sidomulyo	40	8,1

Sumber : Azis, 1970.

Selain itu, dengan cara penentuan jumlah pengembalian kredit seperti ini cenderung memberi peluang petugas ataupun petani untuk berbuat tidak jujur dalam perhitungan panen untuk mengurangi jumlah pengembalian kredit yang akan dibayarkan.

Semakin menumpuknya tunggakan kredit menyebabkan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 11 Th 1969. Inpres ini berisi pernyataan penurunan paket untuk Bimas GR MH 1969/1970 dan penentuan jumlah pengembalian kredit yang didasarkan pada jumlah minimal tertentu atau dalam bentuk uang. Untuk jenis padi PB sebesar 1,125 kg padi kering lumbung atau 417 kg beras penggilingan atau Rp. 15.000,-. Sedangkan untuk padi non PB sebesar 750 kg padi kering lumbung atau 178 kg beras atau Rp. 10.000,-/ha (Wardojo, 1970).

Usaha penurunan paket dilakukan dengan penurunan dosis pupuk dan pestisida serta pembebasan beberapa pengeluaran seperti kendaraan, alat semprot, lampu

perangkap dan pengawasan lampu perangkap pada anggaran Departemen Pertanian.

Penyuluhan

Pada dasarnya pelaksanaan Bimas telah berubah dari ide semula sebagai suatu kegiatan penyuluhan karena pendekatan yang digunakan cenderung instruktif dengan keterlibatan pihak petani yang relatif rendah dalam hal perencanaan atau pengambilan keputusan. Perhatian utama pelaksana program lebih kepada upaya mencapai target produksi secepatnya. Namun demikian pada kenyataannya hasilnya malah menunjukkan sebaliknya sebagai akibat tidak langsung dari kurangnya perhatian terhadap aspek penyuluhan.

Dengan demikian keikutsertaan petani dalam program Bimas ini cenderung sebagai akibat dari paksaan karena arealnya termasuk sasaran Bimas, bukan atas dasar kesukarelaan. Pendekatan yang cenderung instruktif, terbukti dari pemberian paket kredit yang sifatnya seragam untuk semua daerah tanpa memperhatikan keragaman kebutuhan di tingkat daerah. Demikian pula dalam hal pelaksanaan kegiatannya, pada Bimas CIBA I, penyemprotan untuk seluruh wilayah dilaksanakan dengan cara penyemprotan dengan menggunakan pesawat udara walaupun sebenarnya petani lebih menyukai untuk melaksanakan sendiri. Selain itu, ditinjau dari segi efisiensi masih lebih menguntungkan untuk dilakukan secara individual, mengingat keragaman dalam waktu tanam dan lain-lain.

Ide dasar pelaksanaan Bimas sebagai suatu kegiatan penyuluhan dengan metoda "*olie vlek*" tidak diterapkan lagi (Wardojo, 1970). Karena areal Bimas tidak terkonsentrasi dan karena pelaksanaannya seolah-olah mengejar target produksi, maka secara keseluruhan menunjukkan kurangberhasilan dalam hal penyebaran inovasi. Hal ini nampaknya berkaitan dengan keterbatasan tenaga penyuluh dan tingkat kemam-

puan penyuluh. Selain itu, juga seperti gambaran penyuluhan di negara yang sedang berkembang, fungsi penyuluh lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan administratif dan bahkan penyuluh melakukan kegiatan di luar kegiatan penyuluhan seperti penyediaan sarana produksi, pengawasan, penagihan kredit-kredit Bimas dan lain sebagainya.

Pada Tabel 11 terlihat bahwa intensitas penyuluhan sangat rendah. Selain itu terlihat pula adanya hubungan antara tingkat pengenalan petani mengenai input baru/teknologi baru sebelum MH 1968/1969 dengan tingkat pelaksanaan panca usaha oleh petani pada MH 1968/1969.

Tabel 11. Intensitas Penyuluhan, Pengenalan Input Baru dan Tingkat Pelaksanaan Panca Usaha di Enam Desa Contoh Bimas G.R. CIBA - I M.H.1968/1969 di Jawa

No.	Desa	Intensitas Penyuluhan	Pengenalan Input Baru	Tingkat Pelaksanaan Panca Usaha
1.	Cidahu	11	54	56
2.	Mariuk	13	32	45
3.	Rowosari	12	63	58
4.	Banyutowo	12	52	59
5.	Gemarang	20	68	59
6.	Sidomulyo	20	74	78

Keterangan : Intensitas penyuluhan pengenalan input : baru dan tingkat pelaksanaan Panca Usaha discore dari 0 - 100

Sumber : Azis, 1970.

Keikutsertaan petani dalam program Bimas antara lain karena adanya insentif berupa subsidi pupuk dari pemerintah. Hal ini terbukti dari sikap petani terhadap Bimas cenderung "positif" dalam arti lebih menyukai ikut Bimas daripada tanpa ikut Bimas dengan harga pupuk di pasar Rp. 24,-/kg (Tabel 12).

Penolakan masyarakat terhadap Bimas adalah karena alasan ekonomi yaitu kesangsian akan mendapatkan

keuntungan yang layak untuk mereka. Dari hasil survey Bimas SAE dari seluruh sampel di Jawa, petani yang menolak Bimas bila B/C rasionya lebih kecil dari 1,5 dan menerima Bimas CIBA I adalah bila B/C rasionya lebih besar dari 1,5 (Azis, 1970).

Tabel 12. Pilihan Petani antara Dua Alternatif : Bimas Umum Pupuk Tidak Dihargakan 1 kg Urea 1 kg Beras di Desa Musim Garap dengan Bimas CIBA (Persentase Petani Contoh).

Alternatif	BIMAS NON PB				BIMAS PB			
	Jabar	Jateng	Jatim	Jawa	Jabar	Jateng	Jatim	Jawa
1. Bimas Umum (1 kg Urea 1 kg beras)	-	100	-	35	4	88	-	32
2. Bimas CIBA	92	-	92	67	88	12	100	67
3. Tidak berpendapat	8	-	8	2	8	-	-	1
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Azis, 1970.

Pada tahun 1969, ditengah-tengah masa pelaksanaan Bimas Gotong Royong dikeluarkan Keppres RI Nomor 95 Tahun 1969. Keppres ini mengatur pembentukan Badan Pengendali Bimas di tingkat Departemen Pertanian, Badan Pembina Bimas di tingkat Propinsi/Dati I, Badan Pelaksana Bimas di Daerah Kabupaten/Dati II, Badan Pembina Bimas Kecamatan di tingkat kecamatan dan Badan Pembina Desa di tingkat desa. Dalam periode ini Bimas diartikan sebagai suatu kegiatan penyuluhan pertanian secara massal, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara intensifikasi dalam tahap pertama khusus padi/beras, yang sekaligus meningkatkan pula kesejahteraan petani dan masyarakat.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan Bimas Gotong Royong banyak ditemukan kekurangan-kekurangan, antara lain: (1) pengaturan sarana produksi yang sering tidak tepat

jumlah, kualitas dan waktunya, (2) penyuluhan yang kurang intensif, dan (3) pengembalian kredit dengan tingkat bunga yang rendah (18 persen). Namun dibalik kekurangan-kekurangan tersebut, terdapat tiga manfaat Bimas Gotong Royong antara lain :

- (1) Bimas Gotong Royong telah membuktikan bahwa melalui pengusaha-pengusaha swasta nasional, pupuk dan sarana produksi lainnya dapat dikirimkan sampai ke desa bahkan sampai ke sawah petani;
- (2) Cara pemberantasan hama pada tanaman padi melalui penyemprotan dari udara akhirnya terbukti manjur terutama terhadap sundep dan beluk yang merajalela di daerah-daerah sarang hama, yang sebelumnya belum pernah dikuasai;
- (3) Petani non peserta Bimas Gotong Royong, dengan jalan memanfaatkan pupuk murah berasal dari "kebocoran-kebocoran" Bimas Gotong Royong telah meyakini manfaat pupuk dan pestisida dalam usaha peningkatan produksi padi.

Setelah terlaksana selama dua tahun (empat musim tanam), yaitu tahun 1969/1970 dan 1970/1971, masing-masing dengan areal 791.000 ha dan 969.000 ha, pada tahun 1970 Bimas Gotong Royong dihentikan. Sebagai gantinya mulai 1971/1972 dilaksanakan Bimas Nasional yang Disempurnakan.

Bimas Nasional yang Disempurnakan

Pilot Proyek

Ketika di berbagai tempat di Indonesia masih dilaksanakan Bimas Gotong Royong, telah disadari bahwa Bimas mengandung berbagai kelemahan, dan perlu disempurnakan. Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro, seorang Guru Besar dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta merintis penyempurnaan Bimas dengan

melaksanakan pilot proyek di **empat** kabupaten di daerah Istimewa **Yogyakarta**.

Pilot proyek **tersebut** memusatkan perhatiannya pada penyempurnaan kegiatan-kegiatan penunjang pertanian dengan prinsip-prinsip **sebagai** berikut :

- a. pelaksanaan dan kegiatan percobaan, penyuluhan, penyaluran sarana produksi, kredit dan pemasaran harus dijalankan di pedesaan serta tidak diserahkan kepada sesuatu **lembaga/badan**, tetapi diserahkan kepada beberapa **badan** yang dianggap telah mempunyai pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. kegiatan yang bersifat non-ekonomi seperti percobaan dan penyuluhan digerakkan oleh pemerintah, sedangkan kegiatan yang bersifat ekonomi seperti kredit, penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil dapat diselenggarakan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta atau koperasi;
- c. mengusahakan agar petani dapat memanfaatkan jasa-jasa ekonomi yang disediakan berbagai lembaga secara langsung, **namun** lembaga yang ditugaskan memberi jasa tetap dapat memperoleh keuntungan, minimal tidak mengalami kerugian;
- d. membina koperasi agar **mampu** mengambil bagian secara nyata dalam melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan di pedesaan.

Dalam pilot proyek ini diperkenalkan pengorganisasian kegiatan dalam suatu kesatuan wilayah yang disebut "unit desa", merupakan gabungan 6-7 desa dengan total areal sekitar 1.000 ha. Dalam kesatuan wilayah tersebut dibentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) untuk menjalankan fungsi ekonomi, terutama pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta penyediaan sarana produksi.

Perbaikan-perbaikan pelaksanaan Bimas yang **disaran-**kan oleh pilot proyek ini **adalah** :

- a. intensifikasi penyuluhan pertanian dilakukan dengan menambah **jumlah** tenaga penyuluh pertanian dan menempatkan di tingkat kecamatan, tiap tenaga penyuluh **bertanggungjawab** terhadap areal wilayah unit desa (600-1.000 ha);
- b. perbaikan pelayanan kredit BRI, dengan membentuk BRI Unit Desa yang memberikan pelayanan kredit langsung kepada petani perorangan;
- c. perbaikan pelayanan sarana produksi melalui **kios-kios** sarana produksi yang dikembangkan dalam wilayah unit desa;
- d. perbaikan dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil dengan memanfaatkan unit-unit pengolahan hasil, baik yang sudah ada maupun menambah **baru**.

Pelaksanaan

Mengingat kelemahan-kelemahan Bimas **Gotong Royong** serta adanya perbaikan kondisi perekonomian nasional, khususnya persediaan dana pemerintah, mulai **musim tanam 1970/1971** Pemerintah menghentikan Bimas **Gotong Royong** dan menggantinya dengan Bimas Nasional yang Disempurnakan. Bimas Nasional yang Disempurnakan dilaksanakan dengan menerapkan saran-saran pilot proyek **Yogyakarta**.

Pembinaan dalam Bimas Nasional yang Disempurnakan diperbaiki. Dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 400/Kpts/Um/8/1970 dibentuk **Badan Koordinasi Penerangan Bimas** di tingkat **Pusat**, Tim Pembina Penerangan Bimas di tingkat Propinsi dan Tim Pelaksana Bimas di tingkat Kabupaten. Tim ini merupakan "**task force**" dan Pelaksana Harian Bimas yang mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam menetapkan kebijaksanaan penerangan,

merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan penerangan Bimas dan memberikan bimbingan dan petunjuk di bidang penerangan. Untuk lebih melancarkan pelaksanaan Bimas di tingkat yang lebih bawah, maka dibentuklah Badan Pelaksana Bimas Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 248/Kpts/Org/6/1971. Selain itu ditetapkan pula Panitia Urusan Pupuk dan Komisi Pestisida. Panitia Urusan Pupuk dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1972, sedangkan Komisi Pestisida dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243/Kpts/OP/4/1970.

Dalam periode ini Bimas merupakan usaha bimbingan bersama dari berbagai instansi dan lembaga pemerintah, baik di dalam maupun di luar lingkungan Departemen Pertanian, ke arah swadaya masyarakat tani sendiri dengan jalan Panca Usaha, pembinaan hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran serta pembangunan masyarakat desa.

Sasaran Bimas adalah petani/kelompoktani, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Sebagai objek petani merupakan titik sasaran pelayanan, sedangkan sebagai subjek petani merupakan pemimpin sekaligus sebagai pelaksana utama dalam usahatani. Dengan Bimas, perkembangan usahatani diarahkan pada : (a) praktek berusahatani yang lebih baik (*better farming*), (b) berusahatani yang lebih menguntungkan (*better business*), (c) berkehidupan yang lebih layak (*better living*) dan tata kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera (*better community*).

Periode Pemantapan (Intensifikasi Khusus)

Berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 1979, struktur Badan Pengendali Bimas mengalami perubahan. Istilah Badan Pengendali Bimas diubah menjadi Badan Koordinasi Bimas. Struktur Badan Koordinasi Bimas terdiri dari Badan

Koordinasi Bimas dan Satuan Pengendali Bimas. Di tingkat daerah strukturnya **sama** dengan struktur sebelumnya tetapi **istilah Badan** diubah menjadi Satuan. Ketua Satuan Pengendali Bimas dipegang oleh Menteri Muda Urusan Produksi **Pangan** dibantu Sekretaris Satuan Pengendali Bimas yang dirangkap Direktur Jenderal Pertanian **Tanaman Pangan** dan **Wakil** Sekretaris Satuan Pengendali Bimas dirangkap oleh Sekretaris Menteri Muda Urusan Produksi **Pangan**.

Sekretariat Satuan Pengendali Bimas terdiri **dari** 4 Biro, **yaitu** :

- (a) Kepala Biro Administrasi,
- (b) Kepala Biro Perencanaan dan Program,
- (c) Kepala Biro Pengendalian Operasi Lapangan, dan
- (d) Kepala Biro Pengendalian Perkreditan dan Saprodi.

Pada periode ini sistem Bimas **menjalani** pemantapan. **Sebagai** tindak lanjut Keputusan Sidang Kabinet Terbatas tanggal 2 Mei 1979 ditetapkan bahwa akan dilaksanakan perlombaan **Intensifikasi Khusus** sejak MT 1979. **Lomba** intensifikasi khusus pertama **kali** dimenangkan oleh kelompok tani Rajasa dari Kabupaten **Tabanan**, Bali.

Intensifikasi Khusus (**Insus**) adalah pelaksanaan Program Bimas oleh petani sehamparan secara berkelompok **guna** memanfaatkan potensi lahan **sawah** secara optimal. Kegiatan kelompok tani secara keseluruhan **diprakarsai** oleh kelompok inti dalam merumuskan rencana kerja, mencari dan menyebarkan informasi, memimpin dan mengawasi **kegiatan** anggota, melakukan usaha-usaha dan hubungan kerjasama anggota, melakukan usaha-usaha dan hubungan kerjasama dengan **pihak** luar kelompok serta menghadiri forum-forum komunikasi dengan para pemuka masyarakat di desanya.

Untuk mensukseskan program ini ditetapkan penyaluran pupuk melalui KUD. Dalam rangka pembinaan KUD, pemerintah memberi kesempatan kepada KUD untuk membeli pupuk langsung dari Lini III dengan jumlah terbatas (\pm 10 ton)

secara tunai. Pengamanan pertanaman diupayakan dengan pengadaan kredit sprayer. Permasalahan yang dihadapi antara lain masalah tunggakan kredit Bimas. Dalam rapat tanggal 6 Nopember 1979 di Jakarta, disarankan kepada Sidang Ekuin/Kabinet Terbatas agar tunggakan kredit Bimas padi dan palawija yang jumlahnya lebih kurang Rp. 14 milyar (MT1970 - MF 1971) dibekukan/ditangguhkan penagihannya. Saran ini diberikan mengingat kelalaian tersebut bukan sepenuhnya kesalahan petani.

Pada periode pelaksanaan pembangunan pertanian Repelita III, ditetapkan kebijaksanaan untuk mensukseskan berbagai upaya sebagai terobosan dalam menyediakan produksi beras di Indonesia. Terobosan-terobosan tersebut ialah :

- a. Kepada kelompok tani peserta Insus yang menjual hasilnya kepada Bulog diberikan premi Rp. 3/kg gabah kering giling.
- b. Dipersiapkan dan dilaksanakan Operasi Khusus (Opsus) pertama, yaitu : Opsus Tekad Makmur Nusa Tenggara Barat pada MF 1980/1981 seluas 26.200 ha, dengan dukungan :
 - (1) paket kredit ditambah dan disalurkan lebih awal satu bulan (September);
 - (2) penyaluran sarana produksi harus "5 tepat";
 - (3) bibit yang digunakan ialah PB 36;
 - (4) penyaluran dan pembinaan harus ditingkatkan (tidak bersifat rutin).
- c. Keberhasilan Opsus Tekad Makmur NTB diteruskan dan diikuti oleh Opsus Nusa Makmur NTT dan Lappo Ase Sulawesi Selatan pada MF 1981/1982.
- d. Melaksanakan inventarisasi dan penumbuhan kelompok tani secara bertahap, dimulai dengan kelompok tani peserta Insus. Pengakuan terhadap keberadaan kelompok tani dikembangkan. Pada permulaan Pelita III, dikembangkan stratifikasi kelompok tani berdasarkan 10

jurus kemampuan kelompok, sehingga kelompok-tani dibagi dalam 4 kelas yaitu kelompok Pemula, kelompok Lanjut, kelompok Madya dan kelompok Utama.

- e. Areal Insus diperluas, Opsus dikembangkan untuk daerah-daerah lain, pascapanen ditangani lebih baik, Inpres 10 Tahun 1981 (usaha penagihan tunggakan kredit) terus digalakkan.

Usaha intensifikasi terus ditingkatkan dengan cara peningkatan mutu Insus, peningkatan Intensifikasi Umum (Inmum) menjadi Insus dan mengintensifkan daerah-daerah non-intensifikasi pada lahan sawah yang terjamin airnya. Sawah tadah hujan, pasang surut dan lebak, bila memungkinkan dapat menjadi Insus.

Dalam rapat koordinasi Satuan Pengendali Bimas di Jakarta tanggal 10 Desember 1981 diputuskan antara lain persiapan Opsus MI 1982, menetapkan lokasi pembangunan Gudang Lantai Jemur-Kios (GLK) untuk KUD sebanyak 1.263 buah oleh Ditjen Koperasi dan Ditjen Moneter Departemen Keuangan disinkronkan dengan program Bimas. Disamping itu juga ditetapkan keseragaman harga pupuk KCI untuk sub sektor pangan dan non pangan. Pada periode ini dilaksanakan pengembangan intensifikasi komoditas bawang merah, bawang putih dan lombok.

Diinformasikan bahwa di lapangan ditemukan beberapa masalah yang mendesak untuk diatasi, antara lain :

- a. Masalah penanganan pascapanen MI 1981/1982 yang mencakup penyusutan, harga dasar dan penyediaan dana premi untuk peserta Insus yang menjual gabahnya ke DOLOG/BULOG lewat KUD dan masalah banyaknya butir hijau/kapur.
- b. Masalah kekeringan yang terjadi di beberapa daerah, yaitu propinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung dan Kalimantan Barat.

Perluasan Sistem Bimas pada Berbagai Komoditas

Penerapan pola Bimas pada komoditas-komoditas non-padi dilaksanakan sejak Pelita I. Intensifikasi sayuran mulai tahun 1974/1975, intensifikasi tebu rakyat (TRI) dilaksanakan sejak tahun 1975 dan intensifikasi palawija sejak tahun 1982/1983.

Untuk lebih mensukseskan peningkatan produksi pertanian dan meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara beberapa bidang kegiatan, melalui Keppres RI Nomor 62 Tahun 1983 organisasi dan tatakerja Satuan Pengendali Bimas disempurnakan dan dikembangkan.

Sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 62 Tahun 1983, diadakan Rapat Pleno Koordinasi Badan Pengendali Bimas pada tanggal 13 Januari 1984. Pada rapat ini dijelaskan dengan tegas bahwa Badan Pengendali Bimas adalah wadah koordinasi non struktural yang menyelenggarakan Bimas dipimpin oleh Menteri Pertanian sebagai Ketua. Adapun pada setiap bidang dibantu oleh seorang ketua bidang yaitu : Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan selaku Ketua Bidang Tanaman Pangan, Menteri Muda Urusan Produksi Tanaman Keras selaku Ketua Bidang Perkebunan, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan selaku Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan. Dari hasil rapat pleno ini ditegaskan pula bahwa komoditas yang dikoordinasikan oleh Badan Pengendali Bimas dalam program intensifikasi bukan hanya padi saja, tetapi juga mencakup palawija, hortikultura, tebu, kapas, udang, bandeng, ayam bukan ras dan ternak kerja. Adapun penerapan intensifikasi pada komoditas-komoditas lain akan dipertimbangkan secara hati-hati dan bertahap.

Dari hasil pertemuan dengan Kepala Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian dinyatakan bahwa sistem Bimas akan menghilangkan pengkotakan dan fanatik komoditi yang sempit. Administrasi PPL/PPS seyogyanya dipusatkan di

Sekretariat Pengendali Bimas, karena sifatnya operasional penyuluhan untuk mencapai sesuatu sasaran. Dengan penyempurnaan Keppres 6 Tahun **1979** berarti Sekretaris Badan Pengendali Bimas tidak lagi dirangkap oleh Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, sebab mencakup berbagai komoditas non tanaman pangan.

Sesuai dengan Keppres Nomor 62 Tahun **1983** pengertian Bimas adalah merupakan perangkat terpadu dari kegiatan penyuluhan pertanian disertai dengan penyediaan paket sarana produksi pertanian dan kredit, untuk peningkatan produksi pertanian melalui intensifikasi tanaman padi, palawija, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dan keluarganya.

Banyak perkembangan yang terjadi pada periode Keppres 62 Tahun **1983** ini, antara lain :

- a. Kredit massal pola Bimas dihentikan mulai Mei **1985**. Bagi petani yang memerlukan kredit usahatani (KUT) untuk tanaman padi dan palawija disalurkan/disediakan lewat KUD, sedangkan bagi petani yang tidak memperoleh fasilitas KUT, disediakan fasilitas kredit seperti Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), KIK/KMKP dan KMK melalui BRI Unit Desa.
- b. Gerakan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program Intensifikasi Tambak (Intam), Intensifikasi Ternak Kerja (Intek), Intensifikasi Ayam Bukan Ras (Intab), dan Intensifikasi Mina Padi.
- c. Gerakan terhadap pencapaian sasaran areal Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR) dan pengembangan areal TRI di beberapa Propinsi.
- d. Meningkatkan hubungan melembaga antara kelompok tani dan KUD. Untuk memudahkan pembinaan maka wilayah kerja KUD merupakan perkalian bulat dari WKPP, anggota kelompok tani menjadi anggota KUD, dan salah satu KTNA menjadi pengurus KUD.

- e. Penyempurnaan di bidang penyediaan dan penyaluran sarana produksi, penyuluhan pertanian, perkreditan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian terus dilaksanakan.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dengan pola Bimbingan Massal, yaitu memasyarakatkan teknologi baru, sehingga pada tahun 1979 berhasil menembus gejala "*levelling off*" dengan pola Insusnya. Sejak tahun 1984 pola Bimas telah mampu mengantarkan negara Indonesia sebagai negara yang berswasembada pangan/beras. Keberhasilan ini tidak terlepas dari manajemen pola Bimas yang terarah.

Program Supra Insus

Latar Belakang

Tumbuhnya kemampuan kelompok tani merupakan proses belajar melalui interaksi sosial untuk menyelenggarakan usahatani bersama (Insus) yang secara konseptual sebetulnya memberikan bentuk operasional yang konkrit dari pengertian Bimas. Dengan Insus, apa yang diinginkan predikat massal menampilkan dirinya sebagai instrumen penyelenggara program pembangunan pertanian yang berencana. Melalui Insus sebagai inovasi yang dikembangkan untuk menyempurnakan mekanisme pembinaan program intensifikasi yang ditunjang oleh struktur pedesaan maju, maka mekanisme pasar dan pembinaan sosial ekonomi dapat menggairahkan partisipasi petani dalam program intensifikasi.

Pada tahun 1986 peranan Insus terhadap peningkatan produksi beras nasional mulai menunjukkan gejala "*levelling off*", yaitu ketika areal Insus di atas 50 % dari areal panen. Hal ini merupakan ancaman bagi kelestarian swasembada pangan yang dicapai pada tahun 1984 dan harus ditangani secara serius. Kejadian itu hampir sama dengan kejadian pada tahun 1975-1977.

Setelah dikaji secara menyeluruh dengan memperhitungkan potensi dan kendala yang secara operasional dapat dimanfaatkan dan dikendalikan adalah meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan mutu intensifikasi, sambil terus berusaha untuk meningkatkan areal panen di luar pulau Jawa. Adapun peningkatan mutu intensifikasi yang diperhitungkan akan mampu meningkatkan produktivitas lahan saat itu ialah :

- a. peningkatan areal yang menggunakan benih bermutu serta meningkatkan populasi tanaman;
- b. perluasan areal usahatani yang menerapkan pemupukan berimbang dengan dosis dan waktu yang tepat;
- c. peningkatan areal yang menggunakan zat pengatur tumbuh dan pupuk pelengkap cair;
- d. pemberantasan hama/penyakit dengan jalan mengamalkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT); dan
- e. peningkatan mutu pengolahan tanah dengan sekaligus mempercepat pengolahan tanah untuk menjamin terlaksananya pola dan jadwal tanam yang ditetapkan.

Untuk mempertinggi peluang keberhasilan diusahakan agar peningkatan mutu intensifikasi itu terkonsentrasi pada wilayah dengan potensi sumber daya yang terbaik, sehingga masukan perangkat lunak (manajemen, kepemimpinan dan keahlian) dapat dipusatkan untuk beroperasi dan berinovasi di wilayah terbatas dan tidak terpecah. Dalam menangani kondisi dengan wilayah yang lebih luas yang di dalamnya terdapat kerjasama antar kelompok tani pelaksana Insus, maka diperlukan rekayasa sosial dan rekayasa ekonomi baru yang disebut **Supra Insus**.

Pelaksanaan

Ditinjau dari sudut struktur pengelolaan, Supra Insus menampilkan satu pusat pengambilan keputusan manajemen

dalam Supra Insus menjadi empat tingkatan, yaitu individu, kelompok, kelompok KINA tingkat Wilayah Kerja Penyuluhan (WKPP) dan kelompok KINA tingkat Unit Himpunan Supra Insus (UHSI). Hal ini berarti bahwa keputusan tiap petani dalam mengelola usahatannya harus berorientasi dan melaksanakan keputusan tingkat kelompok, tingkat kelompok KINA WKPP dan kelompok KINA tingkat UHSI.

Supra Insus adalah rekayasa sosial dan ekonomi dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar kelompok petani pelaksana Insus pada satu WKPP, yang didukung dengan kerjasama antar KINA dalam satu WKPP, antar KINA dalam satu WKPP dan sekurang-kurangnya 2 WKPP dengan luas areal usahatani sekitar 15 - 35.000 ha. Penyempurnaan terhadap luas hamparan Unit Hamparan Supra Insus terus dikembangkan mengingat dalam pelaksanaannya terdapat keterbatasan. Pada saat sekarang luas Unit Hamparan Supra Insus dapat dilaksanakan pada areal minimal 3000 ha, asal syarat-syarat teknis dipenuhi.

Dengan pola Supra Insus, isu ancaman terhadap pelestarian swasembada pangan sebagai akibat kenaikan produksi pada tiga tahun terakhir yang semakin mengecil dapat dijawab. Pada tahap pertama, yaitu MT 1987, Opsus Jatiluhur Pantai Utara (Opsus Jalur Pantura) meliputi luas 270.000 ha yang tersebar di lima kabupaten (Tangerang, Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu) Propinsi Jawa Barat, ditambah dengan Panduan Supra Insus di tiga kabupaten, yaitu Pekalongan (Jawa Tengah), Jombang (Jawa Timur) dan Sidrap (Sulawesi Selatan).

Pada pelaksanaan Supra Insus yang dimulai MT 1987 diterapkan 10 unsur teknologi yang disebut 10 **Unsur Teknologi Supra Insus** yaitu : (1) Pengaturan pola tanam, (2) Pengolahan Tanah yang sempurna, (3) Penggunaan benih yang bersertifikat/berlabel biru, (4) Pergiliran varietas, (5)

Penerapan jarak tanam yang sesuai dengan buku teknis, (6) Pemupukan berimbang, (7)Tata guna air di tingkat usahatani, (8)Penggunaan pupuk pelengkap cair, (9)Pemakaian pestisida secara bijaksana dan pengendalian jasad pengganggu secara terpadu dan (10)Penanganan panen dan pascapanen.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman tentang keberhasilan petani dan kemajuan teknologi baru yang dapat menghasilkan varietas-varietas unggul baru berpotensi produksi sangat tinggi serta diterapkannya kerjasama dalam dan antar kelompok tani, maka peluang peningkatan produksi pangan masih terbuka lebar.

Bertitik tolak dari gambaran potensi-potensi tersebut di atas, maka tantangan bagi program ini, perlu ditanggapi dengan suatu sistem pengelolaan usahatani yang menganut prinsip teknologi hemat lahan, konservasi dan benvawasan lingkungan serta kepentingan nasional. **Supra Insus** merupakan wujud nyata dari teknologi hemat lahan dan produktivitas tinggi. Dengan demikian perlu lebih dimantapkan lagi. Pemilihan pola **tanam/pola** usahatani perlu mendapat perhatian yang **serius** pula. Tindakan konservasi lahan **harus** melengkapi tindakan teknologi yang lain.

